



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021, perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.
6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan pedoman dan acuan terkait pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 secara efektif, efisien dan ekonomis.
- (2) Tujuan Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :
 1. Mensinergikan pengawsan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Daerah;
 2. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fokus dan Sasaran;
- b. Jadwal pelaksanaan dan Daftar objek pemeriksaan;
- c. Program kerja pengawasan tahunan;
- d. Tanggungjawab dan wewenang; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III FOKUS DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Fokus dan sasaran pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 sasaran program dan/atau kegiatan yang beresiko tinggi;
 - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. Pengawasan yang bersifat *mandatory* atau yang harus dilakukan;
 - d. Pengawasan reformasi birokrasi;
 - e. Kinerja rutin pengawasan;
 - f. Pengawasan prioritas nasional;
 - g. Penegakan integritas; dan
 - h. Peningkatan kapasitas APIP.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (3) Fokus dan sasaran Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Pasal 5

- (1) Program kerja pengawasan tahunan merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Audit Plan*).
- (2) Program kerja pengawasan tahunan merupakan acuan dalam penugasan pengawasan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektur.

Pasal 6

Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. ruang lingkup pemeriksaan;

- b. sasaran pemeriksaan;
- c. objek pemeriksaan yang diperiksa;
- d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. rencana penerbitan laporan;
- f. laporan pemeriksaan;
- g. jumlah tenaga pemeriksa;
- h. anggaran; dan
- i. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Daftar obyek pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah mitra audit yang berpotensi untuk diaudit dan/atau menjadi obyek pemeriksaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d merupakan rencana waktu pelaksanaan penugasan pengawasan dan untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan.

Pasal 8

Program kerja pengawasan tahunan, daftar obyek pemeriksaan dan jadwal pelaksanaan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Inspektur bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pengawasan, daftar objek pemeriksaan dan program kerja pengawasan tahunan APIP.
- (2) Inspektur diberikan wewenang untuk mengubah daftar objek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, daftar objek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30-12-2020

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2020 NOMOR 82

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada :

A. Pemeriksaan Kinerja.

Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan fokus menilai aspek efektif, efisien dan ekonomis.

B. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi :

1. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat dan penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi.
2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan.

C. Pemeriksaan yang bersifat *mandatory* atau harus yang dilakukan oleh Inspektorat.

D. Pengawasan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran menyakinkan data yang tetuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi; dan
2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun area pengawasan, yang meliputi:
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d. Penilaian Zona Integritas;
 - e. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - f. Penanganan Laporan Pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
 - g. Penanganan Pengaduan.

E. Penegakan Integritas, berupa :

1. Dukungan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai.
2. Monitoring dan Evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

F. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi :

1. Penerapan Manajemen Risiko;
2. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
3. Audit Kinerja;

4. Audit Investigasi
5. Pemeriksaan DAK Fisik;
6. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Auditor; dan
7. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi :

A. Kegiatan Reviu

Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/ laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
4. Reviu Laporan Kinerja;
5. Reviu Penyerapan Anggaran, Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Penyaluran Dana Desa;
6. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
7. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Reviu RPJMD;
9. Reviu Dokumen Perencanaan Renstra;
10. Reviu Renja Perangkat Daerah;
11. Reviu KUA, PPAS;
12. Reviu LPPD;
13. Evaluasi Monitoring SPIP;
14. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK dan APIP; dan
15. Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak.

B. Pengawasan Prioritas Nasional, antara lain :

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dengan aparat penegak hukum;
2. Operasional sapu bersih Pungutan Liar;
3. Evaluasi Perencanaan Penganggaran berbasis Gender;
4. Dana Desa; dan
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BUPATI SRAGEN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR **82** TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

KEGIATAN PENGAWASAN	BENTUK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP FOKUS YANG DIAWASI	OBJEK PEMERIKSAAN				RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN / OBRIK	JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK	ANGGARAN / OBRIK (dln ribuan rupiah)	LHP YANG DITERBITKAN
			AUDITOR	PPUPD	GABUNGAN	SEKRETARIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Asistensi Bos	Asistensi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaba n Dana BOS	Laporan Pertanggungjawaba n keuangan Dana BOS di SD					RMP = Januari 2021	20 Korwil (1 Tim 5 Korwil)	14.400	4
							RPK = Februari 2021			
							HP = 6 HP/4 Tim			
Asistensi Bos	Asistensi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaba n Dana BOS	Laporan Pertanggungjawaba n keuangan Dana BOS di SMP					RMP = Januari 2021	20 Kecamatan	14.400	4
							RPL = Februari 2021			
							HP = 6 HP/4 Tim			
Audit	Audit Dana Desa	Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan & Pertanggungjawaba n Dana Desa					RMP = Januari 2021	4 Tim	12.000	4
							RPL = Februari 2021			
							HP = 5 HP/4 Tim			
Reviu Covid 19	Reviu Covid Tahap Pelaksanaan	Laporan Pertanggungjawaba n Dana Penangan Covid 19					RMP = Januari 2021	4 Tim	7.200	4
							RPL = Februari 2021			
							HP = 3 HP/4 Tim			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PDTT Pengawasan Ketaatan NSPK	Pengawasan Prioritas Nasional	Pengelolaan Dana BOS		SD Hidayaturrohma n Kec. Masaran			RMP = Januari 2021	15 Orang	15.750	4
				SD Integral Walisongo Kec. Karangmelang						
				SD MTA Kec. Gemolong						
				SDIT Maarif Islam Terpadu NU Kec. Sumberlawang			RPL = Februari 2021			
PDTT Pengawasan Ketaatan NSPK	Pengawasan Prioritas Nasional	Pengelolaan Dana BOS		SMP Muhammadiyah h 11 Kec. Kedawung			RMP = Januari 2021			
				SMP Informatika Terpadu Tunas Harapan Kec. Plupuh			RPL = Februari 2021	15 Orang	15.750	4
				SMP Muhammadiyah h Kec. Masaran			HP = 7 HP/4 Tim			
				SMPIT Darusalam Kec.Tanon						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reviu Covid 19	Rencanan Kebutuhan Belanja Penanganan dan Pencegahan Covid identifikasi kajian cepat lapangan	Dokumen Rencana Kebutuhan belanja		4 RKB			RMP = Januari 2021 RPL = Februari 2021 HP = 4 HP/4 Tim	15 Orang	9.000	4
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab.					RMP = Januari 2021 RPL = Februari 2021 HP = 2 HP	3 orang	1.100	10
Audit Investigasi	Audit Investigasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruk si Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = Januari 2021 RPL = Februari 2021 HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Januari 2021 RPL = Pebruari 2021 HP = 10 HP	7 orang	7.700	
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi Realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW 1 dari Proses				Perangkat Daerah	RMP = Januari 2021			
							1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan Barang dan Jasa,			
							RPL = Februari 2021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Kapabilitas AP/P, 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan 7. Pengelolaan Dana Desa					HP = 5 HP			
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi Target Capaian Sosialisasi Saber Pungli 1. Siswa Siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RMP = Januari 2021 RPL = Februari 2021		24.000	1

BULAN FEBRUARI 2021

Asistensi	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas	Laporan Keuangan BLUD Puskesmas	BLUD Puskesmas di 20 Kecamatan di Sragen				<div>RMP = Februari 2021</div> <div>RPL = Maret 2021</div> <div>HP = 3 HP / 4 Tim</div>	4 Tim / 16 Orang	36.000	20
Reviu BLUD RS. Dr. Soeratho	Laporan Keuangan BLUD RSID dr. Soeratho	Laporan Keuangan BLUD RSID dr. Soeratho					<div>RMP = Februari 2021</div> <div>RPL = Maret 2021</div> <div>HP = 4 HP / 1 Tim</div>	1 Tim / 16 Orang	9.600	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reviu	Korsupgah KPK	Standar Satuan Harga (SSH)		BPKPD			RMP = Februari 2021 RPL = Maret 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	7 orang	7.350	1
Reviu	Korsupgah KPK	Analisis Standar Biaya (ASB) / Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)		BPKPD			RMP = Pebruari 2021 RPL = Maret 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	8 orang	8.400	1
Monitoring	Korsupgah KPK	Pelaporan LHKPN/LHKASN		Semua OPD			RMP = Februari 2021 RPL = Maret 2021 HP = 10 HP/ 1 Tim	15 orang	22.500	1
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab.					RMP = Februari 2021 RPL = Maret 2021 HP = 2 HP	3 orang	1.100	10
Audit Investasi	Audit Investasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = Februari 2021 RPL = Maret 2021 HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Februari 2021 RPL = Maret 2021 HP = 10 HP	7 orang	7.700	
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi Realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW 1 dari proses				Perangkat Daerah	RMP = Pebruari 2021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Kapabilitas APJP, 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan 7. Pengelolaan Dana Desa					RPL = Maret 2021 HP = 5 HP			
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi Target Capaian Sosialisasi Saber Pungli 1. Siswa Siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RMP = Februari 2021 RPL = Maret 2021		24.000	1

BULAN MARET 2021

Reviu	Reviu LKPD yang disusun oleh BPKPD	LKPD yang disusun oleh BPKPD					RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 14 HP / 1 Tim	1 Tim/16 Orang	33.600	1
Reviu	Reviu Laporan Keuangan Desa	Desa yang terlambat dalam Pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (sampling)					RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 4 HP / 3 Tim	3 Tim/12 Orang	16.800	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reviu	Reviu HPS	Penetapan HPS					RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 4 HP/ 1 Tim	1 Tim/4 Orang	2.400	1
Reviu	Reviu LPPD	DRAFT LPPD		Bagian Pemerintahan Setda			RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 15 HP/ 1 Tim	15 Orang	33.750	1
Reviu	Reviu Laporan Kineja	Lkj IP		Bagian Organisasi			RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	8 Orang	8.400	1
Pemeriksaan	Korsupgah KPK	Kepatuhan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan		DPMTSP			RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	7 Orang	7.350	1
Reviu Covid 19	Reviu RKB	RKB Covid 19		4 RKB			RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 4 HP/ 4 Tim	15 Orang	-	4
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten					RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 2 HP	3 orang	1.100	10
Audit Investigasi	Audit Investigasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Maret 2021 RPL = April 2021 HP = 10 HP	7 orang	7.700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW I dari Proses				Perangkat Daerah	RMP = Maret 2021			
		1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Kapabilitas APJP, 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi Pendaparan Daerah, dan 7. Pengelolaan Dana Desa					RPL = April 2021			
							HP = 5 HP			
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi Target Capaian Sosialisasi Saber Pungli					RMP = Maret 2021			
		1. Siswa Siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RPL = April 2021		24.000	1
							HP = 5 HP			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BULAN APRIL 2021										
Audit	Audit Dana Desa	Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan & Pertanggungjawaban Dana Desa					RMP = April 2021	4 Tim/16 Orang	50.400	12
							RPL = Mei 2021			
							HP = 7 HP/ 4 Tim			
							RMP = April 2021			
Monev	Monev Penyerapan Anggaran PBJ Desa	Penyerapan Anggaran PBJ Desa					RPL = Mei 2021		-	
							HP = 1 HP/ Penguasaan			
							RMP = April 2021			
							RPL = Mei 2021			
Pemeriksaan	Korsupgah KPK	Tahap Persiapan Pemilihan Probility Audit		Perangkat Daerah			HP = 10 HP/ 1 Tim	7 Orang	10.500	1
							RMP = April 2021			
							RPL = Mei 2021			
							HP = 10 HP/ 1 Tim			
Reviu	Pengawasan Pemerintahan	RPJMD		Bappeda Litbang			RMP = April 2021	8 Orang	12.000	1
							RPL = Mei 2021			
							HP = 10 HP/ 1 Tim			
							RMP = April 2021			
Evaluasi	Evaluasi SAKIP	SAKIP		4 PD			RPL = Mei 2021	8 Orang	4.800	4
							HP = 4 HP/ 3 Tim			
							RMP = April 2021			
							RPL = Mei 2021			
Evaluasi	Evaluasi SAKIP	SAKIP		12 PD			HP = 4 HP/ 4 Tim	15 Orang	27.000	12
							RMP = April 2021			
							RPL = Mei 2021			
							HP = 4 HP/ 4 Tim			
Pemeriksaan	Pengaduan Masyarakat	KKN		Aduan			RMP = April 2021	8 Orang		1
							RPL = Mei 2021			
							HP = 2 HP/ 1 Tim			
							RMP = April 2021			
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab.					RPL = Mei 2021	3 orang	1.100	10
							HP = 2 HP			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Audit Investigasi	Audit Investasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = April 2021 RPL = Mei 2021 HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = April 2021 RPL = Mei 2021 HP = 10 HP	7 orang	7.700	
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi Realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW 1 dari proses			Perangkat Daerah	RMP = April 2021				
		1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Kapabilitas A/P/P, 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan 7. Pengelolaan Dana Desa					RPL = Mei 2021			
							HP = 5 HP			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi Target Capaian Sosialisasi Saber Pungli					RMP = April 2021 RPL = Mei 2021 HP = 5 HP		24.000	1
		1. Siswa Siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda								

BULAN MEI 2021

Money	Money Implementasi SPP	Laporan SPP OPD					RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021 HP = 3 HP / 4 Tim	16 Orang	36.000	20
Reviu	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Tahunan	Rancangan Akhir RKPD 2022		Bappeda Litbang			RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021 HP = 7 HP / 1 Tim	8 Orang	8.400	1
Pemeriksaan	Korsupgah KPK	Kepegawaian		BKPSDM			RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021 HP = 7 HP / 1 Tim	7 Orang	7.350	1
Evaluasi	Evaluasi SAKIP	SAKIP		8 PD			RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021 HP = 4 HP / 4 Tim	15 Orang	18.000	12
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab.					RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021 HP = 2 HP	3 orang	1.100	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Audit Investigasi	Audit Investigasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021 HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021 HP = 10 HP	7 orang	7.700	
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi Realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW 1 dari proses				Perangkat Daerah	RMP = Mei 2021			
		1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Kapabilitas A/P/P,					RPL = Juni 2021			
		4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan 7. Pengelolaan Dana Desa					HP = 5 HP			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi target capaian sosialisasi saber pungli 1. Siswa siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RMP = Mei 2021 RPL = Juni 2021		24.000	1

BULAN JUNI 2020

Money	Money Implementasi SPJP	Laporan SPJP OPD					RMP = Juni 2021 RPL = Juli 2021 HP = 3 HP/ 4 Tim	4 Tim/16 Orang	21.600	12
Audit	Audit Probiy	Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Tahap Pemilihan Penyedia					RMP = Juni 2021 RPL = Juli 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	1 Tim/8 Orang	8.400	1
Reviu	Reviu BLT Covid di Desa	Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana BLT dalam rangka Penanganan Covid 19					RMP = Juni 2021 RPL = Juli 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	1 Tim/4 Orang	8.400	2
Reviu	Reviu PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa di Desa					RMP = Juni 2021 RPL = Juli 2021 HP = 6 HP/ 4 Tim	4 Tim/16 Orang	14.400	4
Reviu	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Tahunan	SAKIP		8 PD			RMP = Juni 2021 RPL = Juli 2021 HP = 4 HP/ 4 Tim	15 Orang	27.000	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reviu	Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Tahunan	Rancangan Akhir RKPD Perubahan 2021		Bappeda Litbang			RMP = Juni 2021	7 Orang	7.350	1
							RPL = Juli 2021			
							HP = 7 HP / 1 Tim			
Evaluasi	Pengawasan Pemerintahan Desa	Kinerja Kepala Desa		2 Desa : Desa Gesi Kec. Gesi Desa Genengduwur Kec. Gemolong			RMP = Juni 2021			2
							RPL = Juli 2021			
							HP = 7 HP / 2 Tim			
								4 Orang	4.200	
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten					RMP = Juni 2021	3 orang	1.100	10
							RPL = Juli 2021			
							HP = 2 HP			
Audit Investigasi	Audit Investasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = Juni 2021	6 orang	6.500	2
							RPL = Juli 2021			
							HP = 5 HP			
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Juni 2021	7 orang	7.700	
							RPL = Juli 2021			
							HP = 10 HP			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW I dari Proses 1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan barang dan jasa, 3. Kapabilitas APIP, 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi pendapatan Daerah, 7. Pengelolaan Dana Desa				Perangkat Daerah	RMP = Juni 2021			
							RPL = Juli 2021			
							HP = 5 HP			
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi target capaian sosialisasi saberpungli 1. Siswa siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RMP = Juni 2021		24.000	1
							RPL = Juli 2021			
BULAN JULI 2021										
Audit	Audit Probity	Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Tahap Pelaksanaan					RMP = Juli 2021 RPL = Agustus 2021 HP = 17 HP / 1 Tim	8 Orang	20.400	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reviu	Reviu Covid BLT di Desa	Laporan Pertanggungjawaban Penyeluran Dana BLT dalam rangka Penanganan Covid 19					RMP = Juli 2021	4 Tim /16 Orang	24.000	8
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 5 HP/ 4 Tim			
Reviu	Pengelolaan BMD	Pengelolaan BMD di BPKPD selaku Pengelola Barang					RMP = Juli 2021	8 orang	8.400	1
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 7 HP/ 1 Tim			
Pendampingan/Asistensi	Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda	6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar					RMP = Juli 2021			6
							RPL = Agustus 2021			
				4 PD Pelaksana urusan Wajib Pelayanan Dasar						
		Money		2 PD Pelaksana urusan Wajib Pelayanan dasar			HP = 4 HP/ 4 Tim	7 Orang	4.200	2
Reviu	Reviu RKB	RKB Covid 19		2 RKB			RMP = Juli 2021	7 orang	-	
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 4 HP/ 4 Tim			
Pemeriksaan	Pengawasan Prioritas Nasional	Pengelolaan Dana Desa		4 Desa			RMP = Juli 2021	15 Orang	15.750	4
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 7 HP/ 4 Tim			
Pemeriksaan	Pengaduan Masyarakat	KKN		Aduan			RMP = Juli 2021	8 Orang	-	1
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 2 HP/ 4 Tim			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reviu	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penggunaan Tahunan	Renja Penetapan 2022		4 PD			RMP = Juli 2021	15 Orang	9.000	4
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 4 HP/ 4 Tim			
							RMP = Juli 2021			
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindakan Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab.					RPL = Agustus 2021	3 orang	1.100	10
							HP = 2 HP			
							RMP = Juli 2021			
							RPL = Agustus 2021			
Audit Investigasi	Audit Investigasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
							RMP = Juli 2021			
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 10 HP			
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Juli 2021	7 orang	7.700	
							RPL = Agustus 2021			
							HP = 10 HP			
							RMP = Juli 2021			
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW I dari Proses 1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan barang dan jasa, 3. Kapabilitas ATPP,				Perangkat Daerah	RPL = Agustus 2021			
							RMP = Juli 2021			
							RPL = Agustus 2021			
							RMP = Juli 2021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Angka Kematian Balita (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)					HP = 7 HP/ 1 Tim			
Pemeriksaan	Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		Dinas Sosial			RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	4 Orang	4.200	1
Pemeriksaan	Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi UMKM		Dinas Koperasi dan UMKM			RMP = Oktober 2020 RPL = November 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	4 Orang	4.200	1
Pemeriksaan	Pengawasan Kepala Daerah Kepada Perangkat Daerah	Kinerja Urusan Bidang Pendidikan		Dinas Pendidikan			RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 7 HP/ 1 Tim	3 Orang	4.200	1
		Fokus: Angka Partisipasi Murni (APM)								
Pemeriksaan	Pengawasan Prioritas Nasional	Pengelolaan Dana Desa		2 Desa			RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 7 HP/ 4 Tim	7 Orang	-	4
Pemeriksaan	Pengawasan Prioritas Nasional	Pengelolaan Dana Desa		2 Desa			RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 7 HP/ 4 Tim	12 Orang	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeriksaan	Pengaduan Masyarakat	KKN		Aduan			RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 2 HP / 1 Tim	8 Orang		1
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindakan Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab.					RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 2 HP	3 orang	1.100	10
Audit Investigasi	Audit Investigasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Oktober 2021 RPL = November 2021 HP = 10 HP	7 orang	7.700	
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW I dari Proses				Perangkat Daerah	RMP = Oktober 2021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan barang dan jasa, 3. Kapabilitas APJP, 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi pendapatan Daerah, 7. Pengelolaan Dana Desa					RPL = November 2021			
							HP = 5 HP			
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi target capaian sosialisasi saberpungli 1. Siswa siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RMP = Oktober 2021		24.000	1
							RPL = November 2021			

BULAN NOVEMBER 2021

Monev	Monev Implementasi Siskeudes	Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Siskeudes					RMP = November 2021			
							RPL = Desember 2021	4 Tim/ 16 Orang	9.600	4
							HP = 4 HP/ 4 Tim			
Audit	Audit Kinerja	Kinerja Program Kegiatan pada OPD yang menjadi sampling					RMP = November 2021			
							RPL = Desember 2021	4 Tim/ 16 Orang	24.000	4
							HP = 10 HP/ 4 Tim			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Audit	Audit Dana Desa	Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan & Pertanggungjawaban Dana Desa					RMP = November 2021	4 Tim/16 Orang	16.800	4
							RPL = Desember 2021			
							HP = 7 HP/ 4 Tim			
Pemeriksaan	Pengawasan Prioritas Nasional	Pengelolaan Dana Desa		4 Desa			RMP = November 2021	15 Orang	504.000	4
							RPL = Desember 2021			
							HP = 7 HP/ 4 Tim			
Pemeriksaan	Pengawasan Kepala Daerah Kepada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		Dinas Pariwisata			RMP = November 2021	4 Orang		1
							RPL = Desember 2021			
							HP = 7 HP/ 1 Tim			
Evaluasi	Pengawasan Kepada Daerah terhadap Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Kecamatan		7 Kec. Kec. Tanon Kec. Sambungmacan Kec. Ngrampal Kec. Sidoharjo Kec. Gesi Kec. Karanemalan Kec. Jenar			RMP = November 2021	4 Orang	4.200	7
							RPL = Desember 2021			
							HP = 7 HP/ 4 Tim			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten					RMP = November 2021	3 orang	1.100	10
							RPL = Desember 2021			
							HP = 2 HP			
Audit Investasi	Audit Investasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = November 2021	6 orang	6.500	2
							RPL = Desember 2021			
							HP = 5 HP			
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = November 2021	7 orang	7.700	
							RPL = Desember 2021			
							HP = 10 HP			
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW I dari Proses 1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan barang dan jasa, 3. Kapabilitas APIP,				Perangkat Daerah	RMP = November 2021			
							RPL = Desember 2021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi pendapatan Daerah, 7. Pengelolaan Dana Desa					HP = 5 HP			
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi target capaian sosialisasi saberpungli 1. Siswa siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RMP = November 2020 RPL = Desember 2021		24.000	1

BULAN DESEMBER 2021

Reviu	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	Realisasi dan penyerapan Anggaran DAK sampai Triwulan IV 2021					RMP = Desember 2021 RPL = Januari 2022 HP = 2 HP / 4 Tim	4 Tim/ 16 Orang	19.200	16
Asistensi	Pemeriksaan Serentak Kas Opname	Kas Opname pada BLUD					RMP = Desember 2022 RPL = Januari 2022 HP = 3 HP / 4 Tim	4 Tim/ 16 Orang	36.000	20
Pemeriksaan	Pengawasan Prioritas Nasional	Pengelolaan Dana Desa		12 Desa			RMP = Desember 2021 RPL = Januari 2022	15 Orang	47.250	12
				Desa Blimbing Kec. Sambirejo						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Desa Dawungan Kec. Masaran			HP = 7 HP/ 4 Tim			
				Desa Pilangsari Kec. Ngrampal						
				Desa Kedawung Kec. Kedawung						
				Desa Ngandul Kec.						
				Sumberlawang						
				Desa Sigit Kec. Tangen						
				Desa Plupuh Kec. Plupuh						
				Desa Bendungan Kec. Kedawung						
				Desa Kedungupit Kec. Sragen						
				Desa Kedungwaduk Kec.						
Desa Kaliwedi Kec. Gondang										
Desa Bentak Kec. Sidoharjo										
Pemeriksaan	Pengaduan Masyarakat	KKN		Aduan			RMP = Desember 2021	15 Orang		1
			RPL = Januari 2022							
			HP = 3 HP/ 1 Tim							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemantauan	Pemantauan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	Percepatan Tindakan Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab.					RMP = Desember 2021 RPL = Januari 2022 HP = 2 HP	3 orang	1.100	10
Audit Investasi	Audit Investasi Substansi Surat Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Menyelesaikan Masalah tertentu yang menjadi isu strategis			OPD Kab. Sragen	OPD Kab. Sragen	RMP = Desember 2021 RPL = Januari 2022 HP = 5 HP	6 orang	6.500	2
Verifikasi LHKASN	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	LHKASN bagi pejabat fungsional tertentu dan Fungsional Umum se Kab. Sragen				Perangkat Daerah	RMP = Desember 2021 RPL = Januari 2022 HP = 10 HP	7 orang	7.700	
Verifikasi Laporan Rencana Aksi Daerah	Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi KPK	Verifikasi realisasi Target Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi TW I dari Proses 1. Perencanaan Anggaran, 2. Pengadaan barang dan jasa, 3. Kapabilitas APIP, 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu,				Perangkat Daerah	RMP = Desember 2021 RPL = Januari 2022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Manajemen ASN, 6. Optimalisasi pendapatan Daerah, 7. Pengelolaan Dana Desa					HP = 5 HP			
Sosialisasi	Sosialisasi Saber Pungli	Realisasi target capaian sosialisasi saberpungli 1. Siswa siswi SMA 2. Organisasi Wanita 3. Organisasi Pemuda					RMP = Desember 2021 RPL = Januari 2022		24.000	1

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI